

SEMARANG CITY AREA EXPANSION IN 1976: A HISTORICAL STUDY OF HANDLING POPULATION SURGE AND SOCIO-ECONOMIC INEQUALITY-

Perluasan Wilayah Kota Semarang Tahun 1976: Studi Historis Atas Penanganan Lonjakan Penduduk Dan Ketimpangan Sosial-Ekonomi

Maurice Mu'afa Dzulhadj ^{1a(*)} Ibnu Sodik ^{2b}

¹² Universitas Negeri Semarang Sekaran, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah

^a morismuafa@students.unnes.ac.id

^b ibnusodik@mail.unnes.ac.id

(*) Corresponding Author

morismuafa@students.unnes.ac.id

How to Cite: Maurice Muafa Dzulhadj. (2025). Perluasan Wilayah Kota Semarang Tahun 1976: Studi Historis Atas Penanganan Lonjakan Penduduk dan Ketimpangan Sosial-Ekonomi. doi: 10.36526/js.v3i2.5642

Received : 27-06-2025
Revised : 21-07-2025
Accepted: 31-07-2025

Keywords:

Semarang,
New Order,
regional expansion,
urbanization,
spatial policy,
city history

Abstract

This article examines the 1976 Semarang City expansion policy in response to the population surge and socio-economic disparities that emerged in the early New Order era. The study uses a historical-critical approach, drawing on local newspaper archives (Suara Merdeka and Kartika), statistical data from 1973 to 1977, and official regulations (Government Regulation No. 16 of 1976). The research findings reveal that the expansion was initiated locally by Mayor Soepardjo Roestam and later received official approval from the central government. The policy expanded the city's administrative area from approximately 9,742 hectares to 37,366 hectares through the addition of seven new sub-districts. While the expansion succeeded in opening up space for growth and redistributing urban density, it also posed substantial administrative, social, and fiscal challenges. Contemporary media reports highlighted gaps between planning and implementation, including administrative overload at the sub-district level, under-served rural areas, and delayed infrastructure development in newly integrated zones. This article concludes that the expansion of Semarang City in 1976 was a complex spatial planning policy, reflecting the top-down development model of the New Order regime, which prioritized regional expansion as a solution to urban pressures.

PENDAHULUAN

Kota Semarang merupakan salah satu kota penting di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan peran strategis dalam berbagai aspek, mulai dari perdagangan, pemerintahan, hingga perkembangan sosial budaya. Sebagai kota pesisir yang terus berkembang, Semarang mengalami berbagai dinamika perubahan dari masa ke masa. Semarang memiliki lokasi yang strategis, kekayaan alam dan potensinya menarik perhatian bagi penjajah untuk kegiatan perdagangan. Segala produk pertanian dari pedalaman Jawa Tengah, diekspor melalui Pelabuhan Semarang. Sehingga sebegitu pentingnya wilayah Kota Semarang sebagai kota Pelabuhan, bahkan sampai pasca kemerdekaan (Yuliati, 2020).

Perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan Kota Semarang terjadi pada tahun 1906, ketika status kota ini secara resmi ditetapkan sebagai Gemeente atau kotapraja oleh pemerintah Hindia Belanda melalui Decentralisatiewet tahun 1903. Pengelolaan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama. Melalui lembaga teknis Burgerlijke Openbare Werken (BOW), pemerintah kota menangani pembangunan jalan, saluran air, jembatan, serta fasilitas transportasi umum seperti trem dan rel kereta api yang terintegrasi dengan pelabuhan. Misalnya, pada tahun 1909, dilakukan pemeliharaan kanal banjir dan perbaikan gorong-gorong di wilayah Gayamsari dan Kedungmundu. Pelabuhan Semarang sendiri terus dikembangkan dan dihubungkan dengan pusat kota melalui jalur trem dan kereta, memperkuat posisinya sebagai pelabuhan dagang utama di Pantai Utara Jawa. Dari pelabuhan, berkembang ke industri jasa dan barang, kombinasi dari produksi dan distribusi

mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perkembangan kota Semarang yang lebih baik (Ayu, 2024).

Perkembangan sebagai kota industri kian melejit lagi pasca-kemerdekaan Indonesia. kegiatan perekonomian Indonesia sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa, khususnya di Kota Jakarta. Kebijakan ekonomi yang bersifat sentralistik memberikan kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi serta infrastruktur layanan antara wilayah Jawa dan luar Jawa. Macam-macam jenis industri baik pabrikan semacam otomotif, ataupun bidang jasa seperti perbankan, pelayaran, transportasi, maupun industri rumahan semacam mebel, furniture, kusen, pintu, dan sebagainya, tumbuh dan berkembang, termasuk Kota Semarang. Dengan ditetapkannya kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah tahun 1950, pertumbuhan penduduk kian melonjak dalam rentang waktu satu dasawarsa (1951-1960), setidaknya terjadi pertumbuhan sebesar 28% yang disebabkan oleh faktor alami maupun non-alami. Pertumbuhan ini terdiri dari masyarakat pribumi, asing Eropa, dan asing Asia. Dari perkembangan kota Semarang yang semakin meningkat membawa efek samping yang tak terhindar (Kasmadi, 1985).

Pada tahun 1951 jumlah masyarakat Kota Semarang berjumlah 331.059, sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani dan nelayan di dukung dengan kondisi lahan masih luas untuk persawahan dan kondisi air yang baik di sepanjang pantai maupun sungai besar. Lambat laun profesi tersebut mulai ditinggalkan seiring menjamurnya industri di pusat kota sejak lama. Jumlah penduduk setiap tahunnya mengalami kenaikan yang stabil dari tahun 1900-1960, namun diidentifikasi kenaikan terbesar disebabkan oleh urbanisasi. Masyarakat desa yang melakukan urbanisasi didorong oleh kebutuhan akan fasilitas Kesehatan, Pendidikan maupun ekonomi karena penyediaan fasilitas tersebut lebih terpenuhi di kota. (Kasmadi, 1985). Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya perindustrian mempengaruhi tata kelola ruang kota Semarang yang semakin perlu diperhatikan oleh pemerintah, menurut data BPS tahun 1971 terhitung jumlah penduduk sudah mencapai 641.795 jiwa, kenaikan mencapai 2 kali lipat dari tahun 1951 dengan luas wilayah 99,40 Km². Kenaikan sudah dipastikan akan terus naik setiap tahunnya, lahan kosong akan diisi segala kegiatan perekonomian, pemukiman, dan ruang kegiatan lainnya, maka dari itu dibutuhkan wilayah tambahan untuk menunjang kegiatan masyarakat yang terus meningkat.

Munculnya fenomena urbanisasi, jika tidak diiringi dengan pemerataan infrastruktur sosial maka memberikan masalah baru bagi kota, sehingga kota menjadi padat penduduk dan memungkinkan terjadi kegagalan manajemen (Government Failure) (Firman, 2002). Fenomena urbanisasi jika dimanfaatkan dengan tepat dapat menguntungkan pertumbuhan kota yang lebih maju, karena ini sama halnya dengan penambahan kapasitas Sumber Daya Manusia untuk menjalankan aktivitas industri dan ekonomi semakin meningkat. Hal ini dijelaskan dalam Human Capital Theory yang secara Bahasa berarti manusia dan modal, kapital diartikan sebagai modal untuk faktor produksi dalam industri barang dan jasa, sehingga ketersediaan sumber daya manusia menjadi modal pula bagi industri karena manusia bisa diartikan sebagai mesin pekerja. Terdapat pula teori lain yaitu Human Investment Theory yang mengartikan bahwa sumber daya manusia dapat dijadikan investasi dimasa mendatang yang dapat diukur dengan nilai uang dengan harapan masa mendatang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu menangani berbagai bidang yang dibutuhkan oleh perkembangan industri (Yunianto, 2021).

Meskipun jumlah ketersediaan SDM yang banyak bisa memberikan nilai tambah bagi suatu wilayah untuk pembangunan dalam berbagai sektor, namun Teori Thomas Robert Malthus seorang pakar ekonom dan demografi Inggris mengatakan hal yang berbeda, pertumbuhan penduduk yang melebihi Sumber Daya Alam (termasuk pangan dan penyerapan tenaga kerja) dapat menimbulkan dampak negatif pada suatu kelompok atau wilayah. Dalam konteks Sumber Daya Manusia, jika SDM bertumbuh terlalu cepat tanpa diimbangi peningkatan lapangan kerja dan sumber daya, maka akan menimbulkan masalah pengangguran, persaingan yang ketat dalam pekerjaan dan penurunan upah. serta masalah yang menjadi mimpi buruk bagi suatu kelompok atau wilayah yaitu kemiskinan. Teori ini juga menjelaskan sebab dari suatu kelompok masyarakat atau negara terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan sulit untuk keluar. Salah satu faktornya yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi,

dengan banyaknya orang lahir dan membutuhkan sumber daya namun sumber daya tersebut terbatas, maka beban negara akan berat, ini bisa menghambat jalannya investasi dalam bentuk Pendidikan dan Kesehatan, yang selanjutnya akan berpengaruh pada peningkatan kualitas SDM dan produktivitas (Bohari, 2017). Untuk mengatasi masalah peningkatan penduduk, Kota Semarang melakukan perluasan wilayah keluar pada tahun 1976 dengan mengambil sebagian wilayah kabupaten yang ada di arah selatan, timur dan barat Kota Semarang.

Pada tahun-tahun tersebut kota masih memiliki permasalahan yang masih perlu ditangani, kemiskinan, buta huruf, munculnya kampung illegal dan masalah kesejahteraan masyarakat lainnya masih tinggi, ditambah masalah kepadatan penduduk karena urbanisasi yang selalu bertambah seiring berjalannya waktu (Ridlo, 2016). Lalu muncul kebijakan perluasan wilayah yang diharapkan dapat memberikan ruang pusat kota yang padat agar pemukiman-pemukiman penduduk beralih ke daerah perluasan, namun kenyataannya perluasan hanya mengatasi sementara kepadatan penduduk, kepadatan penduduk dan arus urbanisasi tetap berjalan sampai berkembang ke daerah lain termasuk daerah perluasan. Kemungkinan-kemungkinan yang muncul dari kebijakan perluasan tentu harusnya sudah disadari oleh perencana kota, bahwa urbanisasi tidak bisa dibendung dengan hanya memperluas wilayah, perlu perencanaan ulang untuk mengatasi ketimpangan sosial ekonomi sebagai penyebab dari urbanisasi. lalu kebijakan tersebut masih dilakukan untuk kepentingan pembangunan yang sejalan dengan visi misi nasional Orde Baru yang terpusat di kota.

Penelitian ini penting untuk dikaji, karena penulis lain belum ada yang membahas secara detail dengan sudut pandang sejarah dalam kajian kebijakan perluasan wilayah Kota Semarang. Maka peneliti menyertakan pertanyaan besar dalam tulisan ini yaitu, Bagaimana penanganan urbanisasi melalui perluasan wilayah, yang akan dipecah lagi dalam rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana kondisi Kota Semarang sebelum perluasan?
2. Bagaimana proses perluasan dan perkembangan wilayah setelah perluasan?
3. Bagaimana dampak perluasan terhadap laju pertumbuhan penduduk?

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan sedikit pemahaman dan menyusun narasi sejarah perluasan Kota Semarang secara kronologis, yang tidak hanya merekam kebijakan dan perubahan wilayah administratif, tetapi juga menempatkannya dalam konteks yang lebih luas. hubungan antara negara dan kota, perencanaan ruang pascakolonial, serta dampaknya terhadap masyarakat urban.

Perluasan tak hanya terjadi di Kota Semarang pada masa Orde Baru, kebijakan yang menetapkan Kota sebagai pusat perkembangan ekonomi membuat kota-kota di Indonesia berkembang pesat, dalam tulisan Denny Zulkaidi berjudul (1991) "Permasalahan Perluasan Kota" dalam artikel ini membahas aktivitas pemerintahan untuk memperluas wilayah kota seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan Padang. Setiap kota yang diperluas memiliki tujuan sama yaitu untuk meningkatkan pelayanan administratif dan menangani permasalahan-permasalahan yang umum terjadi di setiap kota. Dari kebijakan perluasan ini tetap memunculkan masalah, ketidaksiapan dalam pelaksanaan menimbulkan ketimpangan sosial maupun ekonomi seperti kurangnya infrastruktur pendukung administrasi dari ketersediaan aparat, pegawai instansi pemerintah maupun infrastruktur seperti jalan untuk transportasi antar kota

Penelitian yang menjelaskan pengaruh perluasan tidak menangani masalah kepadatan penduduk dijelaskan oleh Hariyanto dalam artikel berjudul "Faktor Determinan Perkembangan Fisik Pinggiran Kota Semarang Tahun 1980-2000". Hariyanto menjelaskan bahwa setelah perluasan daerah pinggiran mengalami pertumbuhan penduduk yang lebih pesat dibandingkan dengan pusat kota sendiri, wilayah yang mengalami pertumbuhan pesat ini terdapat di kecamatan Tembalang, Genuk, Pedurungan, dan Ngaliyan yang sebesar 3% pertahunnya. Bahkan terdapat kecenderungan jumlah penduduk di pusat kota lebih sedikit dibandingkan wilayah-wilayah pinggiran. Dengan mengacu Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) wilayah Semarang dibagi menjadi 4 wilayah pengembangan (WP). WP 1 meliputi kecamatan di pusat kota seperti kecamatan Semarang Selatan, Semarang Utara dan lain-lainnya sebagai wilayah CBD. WP II meliputi Kecamatan Genuk dan Tugu sebagai kawasan industri. WP III meliputi Kecamatan Pedurungan, Tembalang dan Banyumanik dikembangkan menjadi pusat kesehatan, Pendidikan, dan pemukiman. WP IV meliputi kecamatan

Gunungpati, Mijen, dan Sebagian Ngaliyan untuk pengembangan sektor pertanian dan sumber air bagi masyarakat Kota Semarang (Hariyanto, 2005).

Untuk mengetahui pola perkembangan migrasi Kota Semarang dijelaskan oleh Saratri Wilonoyudho dalam artikelnya berjudul "Migrasi Dan Involusi Di Kota Semarang". Dijelaskan bahwa sejak Semarang menerima masuknya modal besar untuk membangun aktivitas bisnis komersial, terdapat sektor informal (Footloose Industry) yang mengikuti dan berkembang. Masyarakat migrasi mampu menciptakan jenis-jenis pekerjaan baru sehingga menimbulkan pengaruh *Push Factor dan Pull Factor* menciptakan involusi perkotaan. Dampak migrasi menyebabkan daya dukung lahan dan lingkungan melemah, rencana kota tidak berjalan baik sehingga diperlukan kebijakan mengurangi arus migrasi dan penataan ulang pembangunan kawasan desa maupun kota dengan serentak agar selaras dengan kapasitas lingkungan dan kapasitas sosial yang tersedia (Wilonoyudho, 2014).

METODE

Dalam buku Pengantar Ilmu Sejarah karya Kuntowijoyo, beliau memberikan 5 tahapan dalam Metode Penelitian Sejarah, yaitu: (1) Pemilihan Topik, (2) Pengumpulan Sumber, (3) Verifikasi, (4) Interpretasi, dan (5) Penulisan (Kuntowijoyo, 2018).

Pemilihan Topik Sejarah Kota dengan judul "Perluasan Wilayah Kota Semarang Tahun 1976: Studi Historis Atas Penanganan Lonjakan Penduduk Dan Ketimpangan Sosial-Ekonomi" bukan tidak memiliki alasan yang kuat. Judul mengenai perluasan wilayah kota belum banyak yang mengkaji, terutama dalam sudut pandang sejarah. Bahkan penulisan Sejarah Kota selalu dikaji dengan pertanyaan skala dan metodologi, peneliti harus berusaha mencari dan menghubungkan segala informasi untuk menghidupkan narasi Sejarah Kota (Basundoro, 2016). Penulis memilih judul ini juga karena rasa penasarannya akan Sejarah Kota Semarang sebagai tanah kelahirannya, sehingga mencoba mengkaji bagaimana proses kebijakan yang diambil pada masa-masa sebelumnya yang menciptakan keadaan seperti saat ini.

Pengumpulan Sumber, penulis menggunakan sumber-sumber kontekstual sebagai bahan penelitian, sumber tertulis dibagi dari Primer dan Sekunder. Sumber primer didapatkan dari koran Suara Mereka dan Kartika yang mengabarkan informasi tentang peristiwa, keadaan dan perkembangan masyarakat pada tahun 1970-an di Kota Semarang. Terdapat juga sumber dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang surat keputusan mengenai kebijakan perluasan, dan data statistik dari BPS untuk melihat secara rinci penduduk kota Semarang pada tahun penelitian.

Verifikasi, verifikasi memiliki dua tahapan yaitu verifikasi Autentitas dan kredibilitas. Autentitas dan Kredibilitas dari sumber tertulis sudah dipastikan karena sumber koran yang didapatkan dari Depo Suara Merdeka dan Dinas kearsipan Provinsi Semarang, sedangkan untuk data statistik dan dokumen pemerintah didapatkan dari publikasi yang dikeluarkan langsung oleh website Dinas Perpustakaan dan BPS Provinsi Jateng langsung.

Interpretasi. Interpretasi yang dijelaskan oleh Kuntowijoyo memiliki 2 cara yaitu Analisis dan Sintesis, proses ini dilakukan oleh penulis dengan menganalisis data statistik dan koran untuk mensintesis (menghubungkan) kedua atau lebih informasi untuk mengurutkan kejadian peristiwa yang berjalan pada peristiwa yang dikaji.

Selanjutnya tahap yang terakhir yaitu Penulisan, tahap dimana penulis menyampaikan hasil penelitian yang sudah lama dikaji dengan berbagai pencarian tempat sumber, interpretasi dari berbagai informasi yang sudah diverifikasi dan akhirnya mendapatkan kesimpulan final atas rasa penasaran dari topik yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Tingginya Laju Pertumbuhan Ekonomi Menjadi Magnet Urbanisasi

Masyarakat Kota Semarang memiliki karakter Heterogen yang dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan dan pelabuhan sejak masa Kerajaan Mataram, para pedagang mulai menetap dan berbaur dengan masyarakat lokal sehingga menciptakan Heterogenitas dari etnis, agama dan budaya. Seperti yang sudah dijelaskan di pendahuluan, pada tahun 1950 masyarakat kota Semarang masih banyak yang bekerja sebagai petani dan nelayan tradisional. Namun pada perkembangannya,

masyarakat mulai beralih dari pekerjaan tradisional ke industri, masyarakat industri mulai menonjol pada tahun 1960 (Kasmadi, 1985). Pada periode ini terbilang masyarakat Semarang sedang hidup dalam tekanan sosial yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang pesat, masyarakat yang tidak mampu mengikuti kemajuan akan terMarjinalisasi sehingga memunculkan lapisan kemiskinan di sisi lain kota (Jumaidi & Fatkhia, 2014)

Sejak awal masa Orde Baru, pembangunan ekonomi di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang kuat terhadap pemusatan aktivitas industri dan ekonomi di wilayah perkotaan, sementara wilayah kabupaten lebih difokuskan pada sektor-sektor berbasis sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan. Pemusatan ini tidak terjadi secara alami, melainkan merupakan hasil dari desain kebijakan nasional yang bersifat top-down. Melalui program Pembangunan Lima Tahun (Pelita) yang dimulai pada 1969, pemerintah menetapkan bahwa pusat-pusat pertumbuhan ekonomi akan dikembangkan di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Semarang. Kota-kota ini kemudian dipilih sebagai lokasi pengembangan infrastruktur, kawasan industri, dan perdagangan strategis (Mayrudin, 2018). Wilayah kabupaten sebagai sentra pertanian dan peternakan dikembangkan pada Repelita III, hal ini diperkuat dengan peningkatan perkembangan peternakan sapi yang terjadi di Kabupaten Semarang sebagai program penguatan pangan selain beras (Ramadhan, 2025).

Kota Semarang memiliki topografi yang beragam, terbagi menjadi dataran rendah di bagian utara dan perbukitan di bagian selatan. Bagian utara, kota bawah fokus dalam sektor perdagangan, jasa dan pemerintahan yang sudah lama dipengaruhi dengan pelabuhan Laut Jawa. Sedangkan kota atas bagian selatan menjadi permukiman dan sentra Pendidikan.

Pada tahun 1970-an, kegiatan perekonomian didominasi oleh sektor perdagangan dan perindustrian di kota bawah. Dalam industri skala menengah dan rumah tangga terdapat produksi Batik Semarang di Kelurahan Rejomulyo, Semarang timur dan di Pasar Bubakan Jalan Patimura. Produksi batik sempat berada pada masa keemasannya pada tahun 1950-1960, namun mengalami keredupan karena bersaing dengan produk tekstil dari luar negeri tahun 1970 (Afreliyanti, 2015). Kehadiran pasar besar seperti johan dan peterongan menjadi pusat perdagangan pada masa itu, bahkan beberapa pasar lainnya berkembang seperti di Pasar Gang Baru, Semawis, dan lain-lainnya di kawasan Pecinan (Jumaidi & Fatkhia, 2014). Sedangkan kota atas menjadi permukiman dan sentra pendidikan perguruan tinggi. Penempatan ini ditandai dengan berdirinya UNDIP pada tahun 1957 di tembalang, IKIP (UNNES) pada tahun 1965 di Gunungpati, UNISSULA di Genuk pada tahun 1962 dan universitas-universitas swasta dan negeri lainnya (Suwitri, 2008).

Kota Semarang sebagai kota Metropolitan dan Ibukota Provinsi Jawa Tengah menjadi pusat dari daerah *Hinterland* bagi wilayah pinggirannya, dan menjadi segala aktivitas keluar masuk metropolitans Kedungsepur, keadaan ini tidak akan lepas dari berbagai masalah dan problem kota Metropolitan di dunia (Ridlo, 2016). Kemiskinan, buta huruf, dan laju Urbanisasi yang tinggi menjadi masalah utama dalam pertumbuhan Kota Semarang, meskipun pertumbuhan ekonomi juga berkembang,

Tabel I. Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kabupaten/Kota, 1971 - 2010 (persentase/tahun).
 Sumber: (BPS, 1978)

Kota	Tahun				
	1973	1974	1975	1976	1977
Magelang	111.020	117.583	103.602	109.510	109.620
Surakarta	464.395	469.705	455.032	435.315	443.129
Salatiga	67.097	68.554	71.365	71.888	74.822
Semarang	692.060	712.549	735.179	916.208	938.590
Pekalongan	111.007	118.995	113.126	115.769	116.784
Tegal	107.689	108.132	109.382	116.620	117.228

Melihat tabel diatas, Kota Semarang selalu menjadi terbanyak di antara kota-kota di Jawa Tengah, bahkan memiliki Kenaikan 24,62% pada tahun 1976. Urbanisasi menjadi faktor utama dalam pertumbuhan penduduk yang selalu bertambah setiap tahunnya, dengan keadan Kota Semarang yang perekonomiannya bertumbuh pesat, maka menarik para masyarakat desa untuk berpindah dengan harapan dapat memperbaiki taraf kehidupan. Namun hal ini mengkhawatirkan membuat kota menjadi sempit sehingga perlu penanganan atas lonjakan Urbanisasi.

b. Perluasan Sebagai Solusi

Dalam mengatasi lonjakan penduduk dan menambah ruang pembangunan, Kol. Hadijanto selaku walikota Semarang melakukan perluasan wilayah ke arah pinggiran pada tahun 1976, tentu kebijakan ini didukung oleh pemerintah pusat karena mendukung pembangunan Orde Baru. Melalui PP No.16 tahun 1976 perluasan dilakukan kearah Selatan, Timur dan Barat atas persetujuan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, Kendal dan Demak, luas Kota Semarang yang awalnya 99,40 km² menjadi 373,70 Km². Perluasan ini memasukkan beberapa kecamatan yang meliputi sebagai berikut:

Tabel II. Daftar wilayah yang dimasukkan pada Kota Semarang. Sumber (PP, 1976)

NO.	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA
1.	Kendal	Tugu	Mangkang kulon, Mangunharjo, Mangkang wetan, Randugarut, Karanganyar, Tugurejo, Jrasah, Ngalian, Beringin, Podorejo, Kehutanan
		Mijen	Gondorio, Kedungpani, Wonoplembon, Ngadirgo, Jatibarang, Wonolopo, Mijen, Tambangan, Purwasari, Cangkiran
2.	Semarang	Gunungpati	Jatirejo, Cepoko, Sedeng, Sukorejo, Sekaran, Ngijo, Nongkosawit, Gunungpati, Mangunsari, Pongangan, Patemon, Pakintelan, Plalangan
		Ungaran	Sumurgunung, Sumurjurang, Pudakpayung, Banyumanik, Pedalangan, Gedawang, Tembalang, Bulusan, Kramas, Jabungan, Mangunharjo, Meteseh, Rowosari
3.	Demak	Genuk	Tambakrejo, Trimulyo, Muktiharjo, Gebangsari, Genuksari, Karangroto, Banjardowo, Sambirejo, Tlogosari Kulon, Bangetayu, Kudu, Sembungrejo, Tlogosari Wetan, Panggaron, Plamongansari, Sendangmulyo

Daerah yang dimasukkan ke Kota Semarang bukan hanya meliputi wilayah administrasi Kecamatan dan Desa, namun juga wilayah perhutanan dan sekalipun tanah kosong yang ada di desa perluasan. Sebelum diperluas Kota Semarang hanya 5 Kecamatan dari peninggalan administrasi pemerintahan Hindia Belanda yang ditetapkan pada tahun 1926 untuk mempermudah menggambarkan dan membedakan wilayah di Kota Semarang saat itu, kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Semarang Barat, Semarang Timur, Semarang Utara, Semarang selatan dan Semarang Tengah. Kecamatan yang dimasukkan ke Kota tidak semua memiliki dinas kerja Kecamatan ini terjadi pada Kecamatan Gunungpati dan Ungaran sehingga wilayah 2 Kecamatan ini sementara digabung dan diserahkan kepada Kecamatan Semarang Selatan.

Persiapan inisiasi dan persiapan pertama kali dalam perluasan ini belum diketahui sejak kapan dimulai, namun dari surat persetujuan pelepasan wilayah yang diputuskan oleh DPRD wilayah setempat, memiliki waktu yang berbeda-beda, untuk yang pertama menyetujui pelepasan wilayah yaitu oleh wilayah Kabupaten Demak melalui surat keputusan tanggal 17 Desember tahun 1974 disusul Kabupaten Kendal dengan Surat Keputusan tanggal 4 Februari 1975 dan Kabupaten Semarang melalui Surat Keputusan tanggal 15 Februari 1975 (PP, 1976). Dengan melihat Tabel I

diketahui jumlah penduduk sudah mencapai 700 ribu lebih pada tahun 1974, melebihi kapasitas penduduk yang dibatasi oleh Walikota Hadijanto.

Penyerahan wilayah secara Formil direncanakan pada tanggal 19 Mei 1976 bertepatan dengan hari Kebangkitan Nasional dan peresmian penggunaan gedung DPRD baru bekas kantor DPU setelah di renovasi, penyerahan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Amir Machmud Bersama walikota Hadijanto dan dihadiri para pejabat Muspida kota dan para camat wilayah perluasan (Suara Merdeka, 1976a), acara ini berjalan secara khidmat dan meriah dengan mengibarkan bendera merah putih dan diakhiri iring-iringan karnaval pembangunan di sepanjang Jalan Ahmad Yani Pandanaran, Jl.pemuda, Jl. Agus Salim dan MT Haryono. Masyarakat sangat antusias dengan peresmian tersebut dengan berbagai kalangan hadir dan para murid SD, SLTP, SLTA, serta pegawai instansi bercampur aduk memeriahkan hari tersebut (Suara Merdeka, 1976c).

Sebelumnya perluasan wilayah telah dilakukan sebelum Kota Semarang, diantara kota-kota di Indonesia terdapat Surabaya yang diperluas pada tahun 1965 dengan UU No.2 Tahun 1965, Jakarta diperluas pada tahun 1974 dengan PP No.45 Tahun 1974, Kota Medan pada tahun 1973 dengan PP No.22 Tahun 1973 dan kota lain yang mengikuti kebijakan ini setelahnya. Ini memperlihatkan bahwa Kota Semarang bukanlah satu-satunya yang melakukan perluasan dan bukan yang pertama kali melakukannya, dan bisa dibilang Kota Semarang hanya mengikuti Kebijakan tersebut. Perluasan bukanlah salah satu opsi dari pemecah masalah penambahan penduduk dan pembangunan di Indonesia, namun kebijakan ini tetap membantu mengatasi pemenuhan ruang atas peningkatan penduduk serta perkembangnya pembangunan yang meningkat. Perluasan tentu menimbulkan konsekuensi yang harus dipikul oleh pemerintah kota, kesiapan dan nilai pendukung mempengaruhi efek yang timbul dari kebijakan ini, Contoh pada Kota Surabaya, menurut Zulkaidi perluasan pada Kota Surabaya sesungguhnya belum diperlukan, dengan melihat kenyataannya belum bisa mengatasi penyebaran penduduk, penyediaan sarana, lapangan kerja dan pengawasan pembangunan. Ketidakefektifan perluasan disebabkan karena tidak diikuti dengan penyusunan operasional, penambahan anggaran belanja dan analisa dampak lingkungan Sosial akibat perluasan (Zulkaidi, 1991).

c. Pembangunan Serta Usaha Mengatasi Masalah Sosial Ekonomi

Setelah dilakukan perluasan wilayah, terdapat perubahan arah pembangunan kota, hal ini dikatakan langsung oleh ketua Bappeda Kota Semarang Ir. Wasono dalam wawancara yang dilakukan oleh tim Suara Merdeka, bahwasannya akan di selenggarakan seminar perencanaan kota pada bulan Juli. Seminar Master Plan yang diadakan bulan Juli 1976 dan dihadiri para petinggi-petinggi pemerintahan saat itu, hasil dari seminar tersebut menyebutkan akan merubah kotamadya yang sebelumnya dikenal sebagai kota perdagangan dan urban menjadi kota Agropolis dalam pembangunan 25 tahun kedepan. Pembangunan yang dipengaruhi perluasan ini akan menjadikan kota perluasan sebagai kota satelit dari pusat kota yang menjadi dekonsentrasi aktivitas, walikota Hadijanto mengatakan bahwa pusat kota tidak diperbolehkan didiami penduduk melebihi 700.000 jiwa, sehinga daerah perluasan menjadi tempat permukiman selanjutnya setelah permukiman kota penuh (Suara Merdeka, 1976h).

Kebijakan perubahan pembangunan dan penggunaan lahan merupakan pengaruh yang diberikan adanya perencanaan pembangunan pada masa awal dan akhir Orde Baru berskala nasional, pembangunan nasional diprioritaskan pada pembangunan fisik dan sektor-sektor yang memberikan dampak besar bagi negara, terutama sektor industri dan pertanian. Sehingga hal tersebut berdampak pada prioritas pembangunan yang mengedepankan pembangunan pusat dan diharapkan dapat mempengaruhi wilayah sekitarnya (Nugroho, 2016). Perluasan wilayah juga merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menunjang pembangunan secara terpusat sesuai perkataan Ir. Wasono yang menjelaskan bahwa Kota Semarang merupakan kota dagang dan urban sehingga penempatan supermarket di kawasan simpang lima yang merupakan Cultur Center Semarang yang tidak menyimpang. Hal ini juga diperkuat penjelasan Walikota Hadijanto yang mengatakan pusat kota tidak diperbolehkan melebihi 700 ribu jiwa dan wilayah perluasan digunakan untuk menampung kelebihan angka tersebut sebagai wilayah satelit.

Dalam pembahasan perencanaan pembangunan kota tersebut kemungkinan besar adalah mengulas Kembali Rencana Induk (RIK) Kota Semarang 1975-2000, pertumbuhan kota diarahkan menjadi kota yang digunakan sebagai aktivitas di dalam lingkup regional Provinsi Jawa Tengah dengan didominasi aktivitas perdagangan, transportasi, pertahanan militer, pemerintahan regional dan industri (Nugroho, 2016). Rencana Induk Kota Semarang mengubah arah pembangunan tata ruang pendukung dengan aspek perekonomian, dengan menyingkirkan aspek-aspek yang kurang menguntungkan akibatnya beberapa bangunan dan lahan dialihfungsikan menjadi Gedung-gedung supermarket dan aktivitas ekonomi lainnya Widiatoro. Wijayanti, (2024). Hal tersebut terimplementasikan pada kawasan Simpang Lima yang awalnya sebagai tempat ruang publik dan difokuskan untuk aktivitas pemerintahan dan kebudayaan. Kebijakan yang dikatakan Ir. Wasono akhirnya terjalankan pada tahun 1980 dengan berubahnya kawasan Simpang Lima menjadi area CBD (Central Business District) (1976), perubahan ini membuat Gedung aktivitas public seperti GOR dan Wisma Pancasila dirubuhkan dan digantikan oleh Gedung Mall Citraland dan Plaza Simpang Lima.

Pembangunan komersil bukanlah satu-satunya yang berkembang dan menjalar karena adanya Rencana Induk Kota, aktivitas ekonomi informal juga berkembang seiring perkembangan sektor formal. Hasil ini dimunculkan oleh kebutuhan alami manusia untuk mencari sumber kehidupan, para sektor ini dipenuhi oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berkeliling dan menjajakan dagangannya ke wilayah yang relatif ramai. Fenomena ini diperbesar dengan adanya arus urbanisasi tinggi ke Kota Semarang, orang-orang tertarik untuk mencari pekerjaan ke kota karena mereka mengetahui perkembangan ekonomi di kota lebih pesat dibandingkan di desa, hidup di kota menawarkan gaji yang tinggi yang mempengaruhi para masyarakat desa ingin mengadu nasib dengan tinggal di kota, terkadang mereka hanya bermodalkan nekat tanpa dibekali oleh kemampuan yang dibutuhkan industri sehingga orang-orang yang tak terbagi pekerjaan di sektor formal beralih pekerjaan di sektor informal. Fenomena munculnya PKL di kawasan Simpang Lima berkembang tak terkendali sehingga dianggap mengganggu ketertiban umum, namun di sisi lain kehadiran PKL dibutuhkan oleh masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut, hal ini menimbulkan kontradiksi antara kebutuhan dan keteraturan penggunaan ruang publik (Purwanto, 2014)

Gambar 1 dibawah memperlihatkan Simpang Lima pada tahun 1970 dengan sekitaran yang belum dipenuhi Gedung-Gedung Mall dan perhotelan berbintang. Simpang lima dibangun atas instruksi langsung oleh Presiden Ir. Soekarno dalam kunjungannya ke-kota semarang dan melihat alun-alun yang lama berada di kawasan dekat pasar Johar dan masjid Kauman sudah terlihat tidak mendukung lagi sehingga alun-alun dipindahkan di persimpangan jalan yang menghubungkan jalan arteri sekunder dan jalan kolektor sehingga tempat tersebut cocok untuk dijadikan pusat kegiatan bagi masyarakat Semarang. Peresmian dilakukan oleh Walikota Soemarjo pada 1 Juli 1969. Peralihan fungsi lahan menjadi kegiatan perekonomian juga menggerus pusat kegiatan olahraga Gor Pancasila Simpang lima, terlihat di Gambar 2 Gor tersebut sudah beralih fungsi sebagai Hotel Ciputra berskala Internasional yang mulai beroperasi tahun 1995 dibawah Kelola Swiss-Belhotel International.

Gambar I. Foto salah satu Gedung di Simpang Lima tahun 1970. Sumber Facebook @Agoes Alvin



Gambar II. Foto perubahan lahan kawasan Gor Pancasila menjadi Hotel Ciputra Simpang lima.

Pengaruh pemanfaatan dan penataan ruang tak berhenti pada wilayah CBD (Central Business District) Simpang Lima, wilayah yang memiliki potensi perkembangan ekonomi kedepan tidak lepas dari perhatian oleh pemerintah, Sektor pasar yang menjadi tempat berkumpulnya pedagang akan ditambah dan direvitalisasi. Pada bulan September 1976 komisi A dan E DPRD kota Semarang melakukan survei terhadap pasar-pasar di wilayah perluasan, survei ini dilakukan untuk mengetahui kemungkinan pembangunan dan revitalisasi pasar, sebab jumlah pasar saat itu dianggap masih kurang jumlahnya dibandingkan dengan jumlah penduduknya (1976k). Rencana pembangunan pasar disediakan lokasi sub-terminal untuk mempermudah mobilitas angkutan menuju pusat kota. Rencana pembangunan juga didukung oleh pendanaan dari pemerintah pusat melalui dana Inpres, kebijakan ini ditangani langsung oleh Gubernur Jateng Soepardjo Rustam dengan pendanaan pemerintah pusat sebesar Rp 2 Miliar untuk wilayah Jawa Tengah. Pembagian dana diberikan setiap daerah di Jateng dengan jumlah yang berbeda-beda tergantung dengan keadaan setiap wilayah, dana ini termasuk Kredit yang harus dibayarkan cicilannya selama 10 tahun, jumlah terbanyak penerima kredit yaitu Kota Semarang sebesar 500 juta dan Surakarta sebesar 300 juta sedangkan wilayah lain sebesar puluhan juta saja (Suara Merdeka, 1976e). Pembangunan dapat dilihat dari pasar Gunungpati yang berada di jalan Cangkiran-Ungaran yang menghubungkan Kecamatan Boja dengan Kecamatan Gunungpati. pasar sebelumnya merupakan pasar desa, lalu dipugar bangunannya dan dijadikan sub terminal pada tahun 1976, hingga saat ini keberadaanya sangat penting untuk masyarakat Gunungpati dan sekitarnya (Anasmk, 2020).

Dalam bidang Pendidikan, sosial dan budaya, terdapat masalah Drop-Out para siswa dari daerah perluasan menjadi salah satu masalah yang harus ditangani. Menurut surat kabar (Suara Merdeka, 1976b), tercatat kurang dari 6300 anak satuan SD terutama dari daerah perluasan mereka tidak melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya, karena keterbatasan ekonomi atau anggapan sekolah tidak terlalu penting membuat para masyarakat tidak meneruskan pendidikan. Kondisi ini tentu menjadi beban bagi pemerintah, sehingga pemerintah mempercayakan kepada Dinas Perburuhan (DIPERBU). Kepala DIPERBU Subiyakto mengatakan akan membina anak-anak Drop-Out melalui pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, Sebagian untuk keadaan darurat mereka diberikan pekerjaan padat karya sementara waktu untuk mengisi waktu luang. Permasalahan Drop-Out sebenarnya bukan masalah baru, hal ini sudah

konfirmasi dalam surat kabar tahun 1974 yang dijelaskan langsung Gubernur Soepardjo Rustam, jadi bukan Kota Semarang yang memiliki masalah siswa Drop-Out (Suara Merdeka, 1974).

Dalam mengatasi masalah Drop-Out sekaligus memperkecil angka pengangguran, usaha peningkatan kesempatan kerja sudah dilakukan dari tahun 1975 oleh Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi (Depnaker Transkop), proyek ini sudah diadakan di daerah Jakarta dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Maka diadakanlah pelatihan ini di Kota Semarang dengan prioritas anak-anak putus sekolah dari SLTP dan SLTA, menurut Drs. Toekwahindro dari kantor tenaga kerja Jateng akan menargetkan 100 anak (Kartika, 1975). namun karena biaya yang dibutuhkan untuk peralatan cukup besar maka sementara melatih 50 orang selama 3 bulan dan nantinya digantikan 50 orang sisanya agar peserta pertama dapat menjadi karyawan terlebih dahulu. Dalam pelatihan yang diajarkan yaitu keterampilan mengelas dengan segala jenisnya, selama pelatihan para peserta mendapatkan uang saku sebesar Rp. 3.750, untuk biaya ditanggung oleh proyek dan nantinya akan dikembalikan kepada para peserta jika sudah bekerja (Kartika, 1976).

Dalam bidang Pendidikan terdapat pembangunan sekolah yang dilakukan untuk meningkatkan pendidikan anak-anak melalui bantuan dari Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jateng untuk membangun sekolah SLTA dan SLTP di Kota Semarang. Biaya pembangunan menelan sebanyak Rp 15 juta, dengan dua SLTA dibangun di daerah jalan Ronggolawe dan Srendol, sedangkan 6 SLTP di wilayah Pegandang, Manyaran, Gunungpati, Genuk dan jalan Ronggolawe (Suara Merdeka, 1976g). Pembangunan sekolah masih dalam tahun pelita II yang dimana misi pemerintah untuk menghapus buta huruf melalui program wajib belajar 6 tahun, kemungkinan alasan wajib belajar banyak siswa yang Drop Out setelah lulus dari SD dan tidak melanjutkan sekolah karena tuntutan sekolah oleh pemerintah hanya 6 tahun saja. Siswa yang hanya lulusan SD dianggap masih kurang dalam keterampilan, baru pada tahun 1984 akhir pelita III dicanangkan program wajib belajar 9 tahun, 6 tahun di SD 3 tahun di SLTP setingkat SMP. Program ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan akan tenaga kerja yang relevan dengan perubahan zaman (Cahyaningsih, 2016).

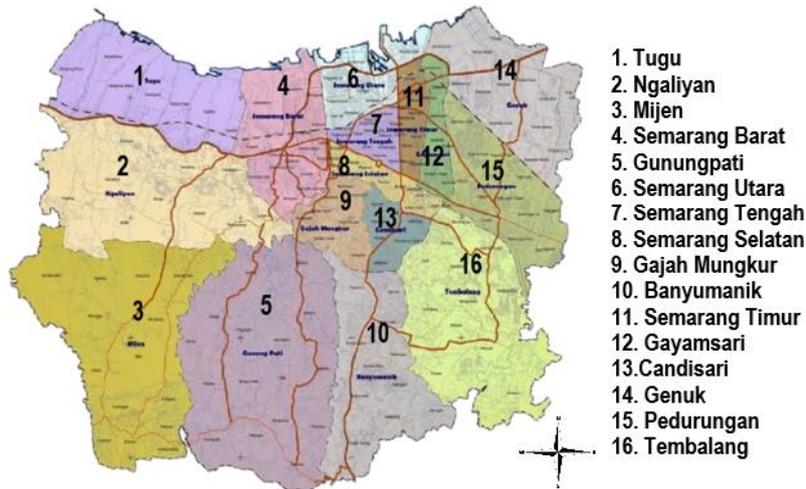
d. Dampak Sosial Dan Ekonomi Bagi Masyarakat

Tujuan perluasan sendiri secara eksplisit menurut PP 16 Tahun 1976 untuk mengatasi kebutuhan pelayanan masyarakat di Kota Semarang dan penyediaan lahan untuk pembangunan kota, dalam pembangunan membutuhkan proses untuk menjalankan rencana yang dicanangkan. Dampak yang muncul setelah terjadi perluasan khususnya segi Sosial belum muncul karena perluasan baru dilakukan, dampak secara nyata akan terlihat saat masyarakat baru mendiami daerah-daerah satelit disaat pekerjaan mereka ada di pusat kota, mereka akan menempuh jarak yang agak jauh untuk ke lokasi tujuan. Namun ada beberapa respon yang berubah dari pemerintah untuk masyarakat desa, yaitu terdapat beberapa kebijakan yang diprioritaskan masyarakat desa khususnya desa-desa yang berada di wilayah perluasan untuk membantu kebutuhan pokok masyarakat desa perluasan, seperti bantuan dalam bentuk beras yang dibagikan oleh pemerintah sekaligus untuk masyarakat yang mengalami masalah banjir di Semarang Bawah (Suara Merdeka, 1976). Terdapat bantuan yang bertujuan untuk meningkatkan Kesehatan masyarakat desa melalui pembangunan Repelita II (1976j), namun pembangunan sarana disini masih di area desa kota dan belum meranah desa perluasan secara spesifik, hal ini dibuktikan dengan pembangunan puskesmas di Pandanaran, penempatan perumahan bidan di Manyaran, pembangunan 400 unit jamban di Pedurungan (Suara Merdeka, 1976m). Realitas keadaan sarana kesehatan pada tahun ini maupun sebelumnya masih sangatlah minim, sehingga perlu masyarakat desa menempuh jarak jauh untuk pergi ke fasilitas kesehatan yang berada di kota.

Dalam bidang Ekonomi tidak banyak berubah, masyarakat yang hidup di wilayah perluasan umumnya masyarakat pedesaan yang Sebagian besar bekerja sebagai petani atau pedagang, bahkan mereka masih mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Melihat kondisi masyarakat Desa yang dikabarkan memiliki pendapatan rata-rata Rp. 36.000 pertahun (Suara Merdeka, 1976n), nilai tersebut masih sangatlah kecil jika dibandingkan dengan Jakarta sebesar Rp. 118.152 menurut informasi yang bisa didapatkan (Sumardi, 1982). Penyelenggaraan program peningkatan kerja

mungkin membuka peluang masyarakat desa untuk mendapatkan keahlian dan pekerjaan, namun karena kuota yang terbatas tentu membuat efek kompetisi dan yang tidak terbagi akan tersingkirkan. Masalah fasilitas dan ekonomi masihlah menjadi alasan bagi masyarakat desa melakukan urbanisasi, sehingga kebijakan perluasan belum mampu menyelesaikan masalah urbanisasi dan pertumbuhan penduduk.

Gambar III. Peta 16 Kecamatan Kota Semarang. Sumber: lamudi.co.id.



Setelah perluasan kelompok yang merasakan dampak paling terasa adalah para pegawai pemerintahan di Kecamatan yang mengurus pelayanan sosial masyarakat, terutama karena Kecamatan sebagai perangkat daerah pembantu Bupati sebelumnya harus menyesuaikan dengan beralihnya ke Walikota Semarang. Dalam bidang administrasi, untuk wilayah Kecamatan Gunungpati dan Ungaran yang ditarik dari Kabupaten Semarang tidak semuanya, sehingga wilayah yang dimasukkan ini diserahkan kepada Kecamatan Semarang Selatan (Suara Merdeka, 1976d). Dampak dari penyerahan wilayah ke Kecamatan Selatan membuat kelebihan beban kapasitas. Untuk masalah ini ditangani oleh Asisten I Sekwilda provinsi Jateng Drs. Soeparto, beliau meminta Dinas-Dinas Vertikal untuk memberi laporan, mengenai keperluan penyesuaian organisasi di Kota Semarang secepatnya dalam rapat yang diadakan pada bulan Mei tersebut. Rapat diadakan lagi pada 17 Juni mengenai usaha pemekaran dari 5 Kecamatan menjadi 12 Kecamatan serta penertiban batas-batas desa yang telah diajukan kepada DPRD (1976i), namun belum ada persetujuan hingga tahun itu. Pemekaran Kecamatan akhirnya berhasil dilakukan pada tahun 1992 melalui PP No 50 Tahun 1992, dengan membentuk Kecamatan baru menjadi 16 Administrasi. Proses ini sangatlah lama mengingat pengajuan pada tahun 1976 dan direalisasikan pada 1992 meskipun terdapat perubahan rencana.

Dalam bidang Keamanan dan Penegakan Hukum Setelah perluasan pemetaan wilayah dan pembagian tugas dari instansi perlu untuk mengetahui ruang kerja dari masing-masing tugas. Untuk itu diadakan Rapat Koordinasi yang dipimpin Kolonel Sitorus Ketua Koordinator Karesidenan Semarang saat itu di Balaikota Semarang pada bulan Agustus saat itu (1976f), hasil rapat mengemukakan perintah Kol. Sitorus untuk Pangdam (Panglima Komando Daerah Militer) VII Diponegoro agar Korem (Komando Resor Militer) dan Koramil-Koramil (Komando Rayon Militer) menyesuaikan Pemekaran Kota Semarang dan administrasi diarahkan ke Kodim (Komando Distrik Militer) lama, ketentuan tersebut dikeluarkan pada tanggal 1 September dan dinyatakan berlaku sejak tanggal 9 September. Berbeda dengan Kodam, Kepolisian struktur organisasinya diatur langsung oleh Komdak (Komando Daerah Kepolisian) (Suara Merdeka, 1976l).

PENUTUP

Penelitian ini telah mengungkap bahwa kebijakan perluasan wilayah Kota Semarang tahun 1976 lahir sebagai respon terhadap dua tekanan utama: lonjakan jumlah penduduk yang menyebabkan penuhnya ruang kota dan untuk mendukung pembangunan masa awal Orde Baru. Namun dalam pengaplikasiannya tidak memberikan dampak signifikan bagi pengendalian pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi yang menjadi masalah utama dari penyebabnya kepadatan ruang di Kota Semarang, masalah pertumbuhan tetap berjalan, dan semakin menambah beban bagi kota, munculnya pemukiman ilegal sebagai dampak dari kemiskinan adalah bukti tidak adanya perubahan yang berarti bagi pihak masyarakat desa terutama desa perluasan. Pembangunan sarana-prasarana masa itu masih memprioritaskan di pusat kota, sedangkan daerah desa-desa belum banyak dijamah kualitasnya untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, usaha hanya diperlihatkan dengan memberikan bansos yang hanya membantu sementara. Meskipun urbanisasi sejatinya tidak bisa dihentikan, namun masih bisa dikendalikan dengan kebijakan pemerintah (Sari & Ridlo, 2021), sejauh penelitian ini pemerintah hanya mengarahkan perkembangan penduduk ke daerah perluasan saja untuk mendistribusikan kepadatan, dalam mengendalikan arus urbanisasi belum ada kebijakan dari pemerintah yang secara ketat mengatur dengan strategis arus urbanisasi.

Temuan studi, yang berdasarkan pada data statistik BPS dan arsip koran Suara Merdeka serta Kartika, menunjukkan bahwa perluasan wilayah berhasil membuka ruang pertumbuhan baru dan mendistribusikan tekanan kepadatan penduduk sementara ke wilayah pinggiran (perluasan). Namun di lapangan, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan administratif (beban kerja kecamatan meningkat, koordinasi lembaga terlambat) karena tidak dioptimalkan terlebih dahulu rancangan kesiapan dalam mengatur administratif. Tantangan sosial (desa rawan mendapat layanan minim, gentrifikasi permukiman lama), dan tantangan fiskal (keterbatasan rata-rata pendapatan penduduk asli dalam mengikuti arus ekonomi yang terus tumbuh). Kebijakan perluasan masih memiliki banyak masalah dan banyak kekurangan seperti masalah-masalah yang muncul di perluasan kota lain sebelumnya.

Penelitian ini masih banyak kekurangan karena membahas pengaruh dan rencana pemerintah dalam mendukung kebijakan perluasan setelah diaplikasikan. Secara keseluruhan, perluasan wilayah Kota Semarang tahun 1976 mencerminkan model pembangunan terpusat Orde Baru yang menekankan ekspansi spasial sebagai solusi atas urbanisasi. Kebijakan ini efektif dalam meredakan kepadatan singkat, namun keberlanjutannya sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan dan kebijakan lanjutan seperti investasi infrastruktur publik, revitalisasi pasar kota terutama wilayah desa, dan program penguatan SDM agar tujuan pemerataan sosial-ekonomi benar-benar tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Afreliyanti, S. (2015). Mengungkap Sejarah Dan Motif Batik Semarang Serta Pengaruh Terhadap Masyarakat Kampung Batik Tahun 1970-1998. *Journal of Indonesian History*, 3(3).
- Anasmk. (2020). *Pasar Gunungpati*. *Tribun Jateng*.
https://tribunjatengwiki.tribunnews.com/2020/10/10/pasar-gunungpati?page=all#google_vignette
- Ayu, D. (2024). Dinamika Perekonomian Indonesia: sebuah Tinjauan Historis dari Sentralisasi ke Desentralisasi. *Jurnal Polyscopia*, 1(2).
- Basundoro, P. (2016). *Pengantar Sejarah Kota*. Penerbit Ombak. . Penerbit Ombak.
- Bohari, N. F. (2017). *Teori Ekonomi David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan Jean Baptiste Say Nuraida Fitriah Bohari / 90100118122 1*.
- BPS. (1978). *Selayang Pandang 1978*. BPS Provinsi.
- Cahyaningsih, G. D. (2016). Latar Belakang Wajib Belajar Masa Orde Baru Tahun 1984. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 4(3), 979-989.
- Firman, T. (2002). Urban development in Indonesia, 1990-2001: From the boom to the early reform. *Habitat International*, 26(3), 229-249.
https://www.researchgate.net/publication/222383129_Urban_development_in_Indonesia_199

- 0-2001_From_the_boom_to_the_early_reform_era_through_the_crisis
 Hariyanto. (2005). Faktor Determinan Perkembangan Fisik Pinggiran Kota Semarang Tahun 1980-2000. *Jurnal Litbang Prov. Jawa Tengah*, 3(1).
- Jumaidi, S., & Fatkhia, F. F. (2014). Gelandangan Kepung Kota Semarang, 1950-1964: Kedatangan, Kehidupan, dan Penanggulangan. *Jurnal Historia Madania*, 8.
- Kartika. (1975). *Proyek Usaha Peningkatan Kesempatan Kerja Di Semarang*.
- Kartika. (1976). *Semarang Adakan Proyek Usaha Peningkatan Kesempatan Kerja*.
- Kasmadi, H. & W. (1985). *Sejarah Sosial Kota Semarang 1900-1950*. Depdikbud.
- Kuntowijoyo. (2018). *Pengantar Ilmu Sejarah. Tiara wicara* (2018th ed.). Tiara Wacana.
- Mayrudin, Y. M. (2018). Menelisik Program pembangunan Nasional Di Era PEMERINTAHAN SOEHARTO. *JURNAL OF GOVERNMENT - JOG*, 4(1).
- Nugroho, M. L. E. & F. H. M. (2016). Pergeseran Kebijakan Tata Ruang Kota Semarang 1975-2011 Dari Pembangunan Sektoral Menuju Keterpaduan Ruang. *Biro Penerbit Planologi Undip*, 12(4).
- PP. (1976). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1976 TENTANG*. file:///C:/Users/BIGBOSS/Downloads/PP NO 16 TH 1976.pdf
- Purwanto, E. (2014). Privatisasi Ruang Publik Dari Civic Centre Menjadi Central Business District (Belajar Dari Kasus Kawasan Simpang Lima Semarang. *Tata Loka*, 14(1).
- Ramadhan, D. T. & C. S. M. U. (2025). Penyebaran Penyakit Mulut Dan Kuku Pada Ternak Di Eks Karesidenan Semarang 1981-1986. *Santhet*, 9(3).
- Ridlo, M. A. (2016). *Mengupas Problema Kota Semarang Metropolitan*. Deepublish.
- Sari, A. R. &, & Ridlo, M. A. (2021). Studi Literature : Identifikasi Faktor Penyebab Terjadinya Permukiman. *Jurnal Kajian RUang*, 1(2), 160–176.
- Suara Merdeka. (1974). *Drop Out bisa timbulkan gangguan SM 1974*.
- Suara Merdeka. (1976a). *65 Desa Yg Masih "Perawan" Akan Masuk Kodya Semarang*. 2.
- Suara Merdeka. (1976b). *Drop Out Di Desa Pemekaran Sudah Dipikirkan Diperbu*.
- Suara Merdeka. (1976c). *Iring-Iringan Karnaval Pembangunan Semarang*.
- Suara Merdeka. (1976d). *Kecamatan Semarang Selatan Tambah Beban*. 2.
- Suara Merdeka. (1976e). *Rp500 Juta Inpres Pasar Untuk Kodya Semarang*. 2.
- Suara Merdeka. (1976f). *Sedang Disiapkan Seminar Perencanaan Kota*. 2.
- Suara Merdeka. (1976g). *Semarang Bangun 2 Gedung SLTA & 6 SLTP*.
- Suara Merdeka. (1976h). *Tercantik Tapi Sayang Tak Terindah*. 2.
- Suara Merdeka. (1976i). *Usaha Pemekaran Kecamatan Di Semarang Dari 5 Jadi 12 Belum Berhasil*.
- Suara Merdeka. (1976j, April 21). *Pemerintah Prioritaskan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pedesaan*. 1.
- Suara Merdeka. (1976k, September 15). *DPRD Kodya Jajagi Tambahan Pasar Desa-Desa Baru*.
- Suara Merdeka. (1976l, September 20). *Wilayah Pemekaran Kodya Jangan Sampai Jadi "Daerah Tak Bertuan*.
- Suara Merdeka. (1976m, November). *400 Jamban Keluarga Dibangun di Desa*.
- Suara Merdeka. (1976n, November 29). *Desa-Desa Rawan Daerah Perluasan Semarang Dapat Bantuan*.
- Sumardi, M. (1982). *Sumber Pendapatan Kebutuhan Pokok Dan Perilaku Menyimpang*. Rajawali. <https://dpk.kepriprov.go.id/opac/detail/8gk9p>
- Suwitri, S. (2008). Semarang Venesia dari Timur Hingga Semarang Pesona Asia:Perubahan Kebijakan Pembangunan Kota Semarang. *Jurnalaplikasi Manajemen*, 8(1).
- Wilsonyudho, S. (2014). Migrasi Dan Involusi Di Kota Semarang. *J. Manusia Dan Lingkungan*, 21, 1.
- Yuliaty, D. dkk. (2020). *Riwayat Kota Lama Semarang*. Sinar Hidoep. SINAR HIDOEP.
- Yunianto, D. (2021). Analisis pertumbuhan dan kepadatan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. *Forum Ekonomi*, 23(4), 688–699. <https://doi.org/10.30872/jfor.v23i4.10233>
- Zulkaidi, D. (1991). Masalah Perluasan Kota. *Jurnal PWK*, 1.